

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

China dan Korea Utara disebut sebagai dua negara yang memiliki hubungan sangat erat dan keduanya saling membutuhkan. Hubungan dekat yang terjalin antara China dan Korea Utara telah berlangsung sejak semenanjung Korea terbagi menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Utara memiliki ideologi yang sama dengan Uni Soviet dan China. Sementara Korea Selatan menganut ideologi yang sama dengan Amerika Serikat.<sup>1</sup> Hubungan China dan Korea Utara dapat dikatakan istimewa dibandingkan dengan kemitraan atau aliansi antar negara pada umumnya. China dan Korea Utara juga memiliki hubungan bilateral yang erat. Adanya kerja sama bilateral yang terjalin antar kedua negara ini didasari oleh adanya kesamaan untuk mewujudkan kepentingan nasional negaranya masing-masing.

Secara historis, aliansi antara China dan Korea Utara dimulai sejak Perang Korea pecah sekitar tahun 1950-1953, dimana saat pasukan China memenuhi semenanjung Korea untuk memberikan bantuan kepada Korea Utara. Sejak saat itu, China telah memberikan dukungan politik dan ekonomi kepada pemerintah Korea Utara.<sup>2</sup> Setelah berakhirnya Perang Korea, China dan Korea Utara sepakat untuk

---

<sup>1</sup> Lidya Pandumas, 2019, *Alasan China Menyepakati Sanksi Terhadap Korea Utara*, Skripsi, Bandung: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, hal. 13.

<sup>2</sup> Arya Wirawan Maulana, 2018, *Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Terhadap Korea Utara Dalam Proses Denuklirisasi Korea Utara Pasca Six Party Talks (PERIODE 2009-2013)*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hal. 42.

menandatangani Traktat Persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Timbal Balik (*Treaty of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance*). Terdapat tiga kesepakatan utama dari perjanjian tersebut ialah kedua negara sepakat untuk saling memberikan bantuan saat terjadinya konflik atau perang, sepakat untuk tidak mencampuri urusan masing-masing negara, dan sepakat dalam melakukan kerjasama bidang politik, ekonomi, dan budaya. Setelah Perang Korea berakhir, China tetap memberikan bantuan kepada Korea Utara berupa bantuan pelatihan militer kepada personel Korea Utara guna meningkatkan kemampuan operasional militernya. Pada tahun 1979-1980an, Korea Utara mulai mengembangkan program nuklirnya.<sup>3</sup>

Pada Februari 2003, Korea Utara menembakkan rudal ke Laut Jepang. Kemudian di bulan Agustus, China meluncurkan pembicaraan enam pihak multilateral atau *six party talks* yang diadakan di Beijing yang terdiri dari Korea Utara, China, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan Rusia untuk mencegah Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklir. Sejak terbentuknya *six party talks*, pemerintah China menjadikan *six party talks* sebagai salah satu fokus utama kebijakan luar negeri China.<sup>4</sup> Pemerintah China menekankan bahwa mereka berharap melalui *six party talks* dapat mencapai kesepakatan tentang denuklirisasi Korea Utara. Oleh karena itu, *six party talks* menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan kebijakan luar negeri dan diplomasi pemerintah China.

---

<sup>3</sup> Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri, *Peran Nuklir Korea Utara sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional*, Jurnal Spektrum, Vol, 7, No, 2 (2010), Semarang: Univeersitas Wahid Hasyim, hal.3.

<sup>4</sup> Muhammad Nabil, 2014, *Diplomasi Multilateral Six Party Talks Dalam Proses Denuklirisasi Korea Utara*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hal. 58.

China melakukan strategi diplomasi koersif yang berujung pada upaya diplomasi yang agresif dan berkelanjutan untuk mengamankan denuklirisasi Semenanjung Korea.<sup>5</sup> China cenderung menekankan pentingnya stabilitas di Semenanjung Korea karena khawatir jika tekanan besar pada Korea Utara dapat menyebabkan ketidakstabilan regional yang dapat memicu konflik yang tidak diinginkan. Oleh karena itu China sering mendukung pendekatan diplomatik dan solusi negosiasi. Sebagai anggota DK PBB, China memiliki tanggung jawab untuk mematuhi resolusi dan sanksi yang disetujui oleh dewan. Namun, China juga akan mempertimbangkan dampak dari sanksi tersebut terhadap situasi di Semenanjung Korea dan hubungan regional secara keseluruhan.

PBB kemudian semakin memperketat sanksi melalui Resolusi 1874 yang mencakup embargo senjata yang melarang semua ekspor impor senjata dan membatasi bantuan keuangan ke Korea Utara.<sup>6</sup> Sebagai sekutu Korea Utara, China sewajarnya membantu Korea Utara menghindari Resolusi DK PBB 2356 yang rilis pada 2 Juni 2017 yang merupakan sanksi tambahan terhadap Korea Utara. Isi dari resolusi ini ialah mengutuk dengan sangat keras kegiatan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik yang dilakukan oleh Korea Utara sejak September 2016 yang melanggar dan mengabaikan resolusi DK PBB.

China memiliki alasan-alasan yang mendasari dukungannya terhadap Korea Utara. Salah satu alasan utama adalah kekhawatiran akan destabilisasi di wilayah

---

<sup>5</sup> Isabelle Brito, *North Korea: A Strategy of Coercive Diplomacy*, Diakses dalam <https://www-iar--gwu-org.translate.goog/blog/iar-web/north-korea-a? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc> (29/11/2023.11.39 WIB)

<sup>6</sup> Hochul Lee, *Rising China and the Evolution of China-North Korea Relations*. The Korean Journal of International Studies, Vol, 12 (2014), South Korea: Incheon National University, hal. 102.

Asia Timur yang dapat memicu kekacauan regional yang merugikan kepentingan China sendiri. Selain itu, bagi China, Korea Utara sebagai *buffer zone* yang dapat mengurangi kemungkinan adanya kehadiran pasukan Amerika Serikat di dekat perbatasan China. China menyadari bahwa konflik yang berkembang di Semenanjung Korea dapat mengganggu ketenangan wilayah tersebut, yang akan memberikan dampak buruk bagi perdagangan, investasi, dan keamanan China pada kawasan Asia Timur. Meskipun China juga beberapa kali mendukung resolusi DK PBB terkait larangan senjata nuklir, namun dalam praktiknya, China terus menjaga stabilitas regional serta keamanan nasionalnya sendiri dengan melakukan beberapa cara diplomasi yang sudah dijabarkan di atas.

Di tahun 2023 tepatnya bulan April, Pyongyang menyatakan berhasil menguji rudal balistik antarbenua (ICBM) berbahan bakar padat untuk yang pertama kalinya. Uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua ini sudah dilakukan sejak tahun 2022. Kemudian bulan September 2022, Korea Utara meluncurkan kapal selam bertenaga nuklir yang ditujukan untuk mengimbangi kapal-kapal selam bertenaga milik Amerika Serikat. Kapal selam ini dilengkapi dengan 10 tabung peluru yang diperkirakan dapat melontarkan rudal balistik dari kapal selam.<sup>7</sup> PBB mengatakan bahwa sepanjang tahun 2023 ini Korea Utara masih terus mengembangkan senjata nuklir dan memproduksi bahan fisil. PBB juga mengatakan bahwa Korea Utara tetap aktif melakukan ekspor batu bara ilegal ditengah sanksi-sanksi dan pembatasan internasional.

---

<sup>7</sup> Tommy Patrio Sorongan, *Bukti Terbaru Kim Jong Un Ingin 'Panen' Senjata Nuklir*, Diakses dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231005152814-4-478215/muncul-bukti-terbaru-kim-jong-un-mau-panen-senjata-nuklir> (29/11/2023.11.51 WIB)

Pada tahun 2022 hingga 2023, DK PBB memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara sebagai tanggapan atas serangkaian uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM). Sanksi ini berupa transaksi keuangan dan mengeluarkan daftar hitam transaksi, khususnya transaksi tunai.<sup>8</sup> Duta besar Amerika Serikat untuk PBB memaksa seluruh anggota DK PBB bertindak melawan peluncuran ICBM Korea Utara yang terus meningkat. Amerika Serikat juga mengusulkan resolusi melalui DK PBB yang bertujuan untuk mengurangi ekspor minyak mentah ke Korea Utara, yang awalnya 4 juta barel per tahun menjadi 3 juta barel. Impor minyak olahan juga dikurangi dari 500.000 barel menjadi 375.000 barel per tahun. Namun China menolak resolusi ini karena China ingin mendorong agar sanksi PBB dilonggarkan untuk tujuan kemanusiaan dan untuk menarik Korea Utara kembali ke perundingan *six party talks*.

Sebagai sekutu Korea Utara, China mengambil langkah-langkah untuk membatasi dampak sanksi pada rakyat Korea Utara seperti memberikan bahan bakar dan sebanyak 240.074 ton bantuan makanan untuk meringankan tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh sanksi.<sup>9</sup> China cenderung melindungi kedaulatan Korea Utara dan menghindari tindakan yang mengarah pada destabilisasi rezim.

Sehingga, fokus penelitian ini berupa respon China terhadap program nuklir yang dijalankan oleh Korea Utara dan sanksi-sanksi apa saja yang diberikan kepada Korea Utara serta respon China terhadap sanksi tersebut.

---

<sup>8</sup> Ani Nursalikhah, *PBB Jatuhkan Sanksi Baru bagi Korea Utara*, Diakses dalam <https://internasional.republika.co.id/berita/mjcg/c/pbb-jatuhkan-sanksi-baru-bagi-korut> (29/11/2023.12.28 WIB)

<sup>9</sup> BBC, *Korea Utara "Siapa yang Mengirimkan Bantuan?"*, Diakses dalam <https://www-bbc-com.translate.goog/news/world-asia-48637518? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc> (30/6/2023.02.03 WIB)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, memunculkan pertanyaan untuk penelitian ini “Bagaimana strategi diplomasi China terhadap sanksi-sanksi DK PBB yang diberikan kepada Korea Utara terkait senjata nuklir?”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apa bentuk respon yang diberikan China terhadap sanksi tambahan yang diberikan DK PBB kepada Korea Utara, untuk mengetahui bagaimana kondisi perkembangan nuklir Korea Utara, dan juga untuk menganalisa sebuah fenomena internasional dengan mengaplikasikan teori hubungan internasional secara ilmiah.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi informasi dan juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Serta dapat menimbulkan kesadaran bersama akan sah atau tidaknya senjata nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara.

#### **a. Manfaat Praktis**

Memberikan wawasan mengenai diplomasi antara China dan Korea Utara terkait pengembangan senjata nuklir di Korea Utara, serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu senjata nuklir.

## **b. Manfaat Akademis**

Memberikan rincian informasi lebih lanjut terkait permasalahan pada penelitian ini dalam program studi Hubungan Internasional.

### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Terdapat lima penelitian terdahulu yang akan penulis kaitkan dengan penelitian yang penulis lakukan. Pertama adalah skripsi dari **Mariza Cesa Ulfa** dengan judul “*Analisa Dukungan Tiongkok Dalam Kebijakan Sanksi Ekonomi DK PBB Terhadap Korea Utara Tahun 2017*”.<sup>10</sup> Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mariza adalah terdapat sanksi ekonomi yang diberikan oleh DK PBB terhadap Korea Utara yang tertulis dalam Resolusi No. 2356, 2371, 2375, dan 2379 Tahun 2017. Program pengembangan nuklir Korea Utara menghabiskan banyak biaya sehingga Korea Utara sangat membutuhkan bantuan ekonomi dari luar.

Tiongkok dapat dikatakan sebagai donatur utama bagi Korea Utara dalam penyediaan bahan pangan, energi, dan perindustrian bagi Korea Utara. Tahun 2006, DK PBB mengeluarkan Resolusi 1718 yang memperingatkan Korea Utara terhadap uji coba nuklirnya. Saat itu, Tiongkok memberikan perlindungan kepada Korea Utara untuk sanksi berat. Tiongkok menyatakan bahwa Korea Utara berhak menjalankan program nuklirnya secara damai.<sup>11</sup> Bentuk perlindungan ini juga

---

<sup>10</sup> Mariza Cesa Ulfa, 2018, *Analisa Dukungan Tiongkok Dalam Kebijakan Sanksi Ekonomi DK PBB Terhadap Korea Utara Tahun 2017*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 3.

<sup>11</sup> Bonnie S. Glaser, *China's Reaction to North Korea's Nuclear Test*, Diakses dalam <https://www.csis.org/analysis/chinas-reaction-north-koreas-nuclear-test> (28/3/2023, 23.10 WIB)

terlihat saat Tiongkok menolak peresmian dekrit Resolusi 1718. Namun pada tahun 2013, Tiongkok mulai ada perubahan sikap dalam proses penyusunan Resolusi 2094. Perubahan sikap Tiongkok ini juga terlihat pada serangkaian sanksi ekonomi yang diberikan DK PBB pada tahun 2017 karena secara resmi Presiden Xi Jinping memberikan dukungan terhadap resolusi-resolusi tersebut.

Metode penelitian ini adalah eksplanatif dengan konsep kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional. Manfaat dari penelitian yang dilakukan Mariza ialah memberikan pengetahuan mengenai apa saja sanksi-sanksi yang diberikan DK PBB kepada Korea Utara. Perbedaan penelitian Mariza dan yang penulis lakukan ialah penulis lebih berfokus pada respon pemerintah Tiongkok dalam menanggapi sanksi yang diberikan DK PBB kepada Korea Utara, sedangkan penelitian Mariza menjelaskan lebih rinci terkait sanksi-sanksi DK PBB dan juga perubahan sikap Tiongkok terhadap sanksi yang diberikan kepada Korea Utara.

Penelitian yang kedua oleh **Vera Zerlinda Alamsyah Sulaiman** dengan judul *“China’s Policy in Refusing North Korea Nuclear Proliferation”*.<sup>12</sup> Hasil dari penelitian yang dilakukan Vera mengenai proliferasi senjata nuklir Korea Utara. Pada penelitian ini disebutkan bahwa China tidak setuju dengan kebijakan proliferasi nuklir Korea Utara. Penolakan China terjadi karena ada beberapa kepentingan nasional yang dipertaruhkan jika mendukung Korea Utara sebab proliferasi nuklir ini sangat bertentangan dengan kepentingan nasional China. Penelitian ini juga memberikan informasi bahwa program senjata nuklir dapat

---

<sup>12</sup> Vera Zerlinda Alamsyah Sulaiman, *China’s Policy in Refusing North Korea Nuclear Proliferation*, Jurnal Politik Internasional, Vol, 22, No, 1 (2020), Indonesia: University of Indonesia, hal. 101.



mempengaruhi keamanan negara lain dan menimbulkan keinginan negara lain dalam mengembangkan senjata nuklir.

China juga ikut serta memberikan sanksi ekonomi terkait kebijakan Korea Utara dalam proliferasi senjata nuklir.<sup>13</sup> Saat Korea Utara melakukan uji coba nuklir untuk kedua kalinya, pemerintah China menolak uji coba tersebut karena China akan tetap pada posisi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara.<sup>14</sup> Pada penelitian yang dilakukan oleh Vera juga membahas mengenai pembicaraan enam pihak atau *six party talks* yang memunculkan beberapa hasil kesepakatan terhadap uji coba nuklir Korea Utara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan perspektif *extended deterrence theory*. Teori yang digunakan oleh Vera untuk melihat variabel apa saja yang mempengaruhi suatu negara dalam mendukung ataupun menolak kebijakan keamanan nasionalnya. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini lebih membahas mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh China terhadap proliferasi nuklir Korea Utara. Sedangkan penulis lebih berfokus pada respon China terhadap sanksi-sanksi yang diberikan kepada Korea Utara.

Selanjutnya penelitian ketiga dilakukan oleh **Dwita Artsy Fitria dan Mohamad Rosyidin** dengan judul ***“Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri: Kebijakan China terhadap Korea Utara pada Isu Krisis Misil di Semenanjung***

---

<sup>13</sup> Yang Jiang, *Sanctions are an Important Tool in China's North Korea Diplomacy*, Diakses dalam <https://www.diiis.dk/en/research/sanctions-are-an-important-tool-in-chinas-north-korea-diplomacy> (27/3/2023, 23.00 WIB)

<sup>14</sup> Kihyun Lee and Jangho Kim, *Cooperation and Limitations of China's Sanctions on North Korea*, *North Korean Review*, Vol, 13, No, 1 (Spring 2017), Seoul: Director of International and Strategic Studies Division, hal. 15.

*Korea*".<sup>15</sup> Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Amerika Serikat melalui DK PBB memaksa China agar mau memberikan sanksi terhadap Korea Utara. Pada 2017 lalu melalui Menteri Luar Negeri Wang Yi, China menerima konsekuensi atas pemberian sanksi terhadap Korea Utara karena China sebagai negara yang mendapatkan dampak terbesar mengenai sanksi tersebut sebab hubungan ekonomi China dan Korea Utara yang erat.

China kemudian menyatakan kesiapan untuk memperkuat sanksi yang akan diberikan kepada Korea Utara untuk melemahkan misi nuklir tersebut. Pada penelitian ini juga disebutkan bahwa Kementerian Perdagangan China mengatakan semua impor dari Korea Utara diberhentikan. Tekanan China dalam mengubah kebijakan luar negerinya juga berasal dari tekanan yang diberikan Korea Utara sendiri dengan terus-menerus melakukan uji coba nuklirnya, sehingga menimbulkan ketegangan di kawasan Asia Timur khususnya di Semenanjung Korea.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwita Artsy Fitria dan Mohamad Rosyidin menggunakan konsep pemikiran Hermann agar mendapatkan konteks perubahan kebijakan luar negerinya. Penelitian ini berbeda dari yang penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian mengenai apa saja yang mendorong China untuk mengubah kebijakan luar negerinya setelah krisis misil di Semenanjung Korea.

---

<sup>15</sup> Dwita Artsy Fitria dan Mohamad Rosyidin, *Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri: Kebijakan China terhadap Korea Utara pada Isu Krisis Misil di Semenanjung Korea*, *Journal of International Relations*, Vol, 7, No, 4 (2021), Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 163.

Sedangkan penulis berkonsentrasi pada bagaimana China menanggapi sanksi-sanksi yang dikenakan kepada Korea Utara.

Penelitian keempat oleh **Yordan Gunawan dan Rima Ayu Andriana** dengan judul ***“The Proliferation of Nuclear Weapons in North Korea: International Law Perspective”***.<sup>16</sup> Hasil penelitian ini ada membahas mengenai pertemuan pertama *six party talks* dalam menyelesaikan denuklirisasi terhadap Korea Utara secara damai. *Six party talks* ini melakukan pertemuan hingga beberapa kali dan membuahkan hasil yang memuaskan. Namun hasil positif itu tidak bertahan lama karena Korea Utara melarang diadakannya *six party talks* setelah Amerika Serikat memberi sanksi ekonomi kepada Korea Utara.

Pengembangan senjata nuklir Korea Utara menjadi masalah yang sangat serius di kancan internasional karena melibatkan banyak pihak serta menimbulkan kerugian yang cukup banyak. Namun dengan begitu, Korea Utara tetap tidak memperdulikan hal tersebut dan semakin mengembangkan teknologi senjata nuklirnya. Korea Utara semakin di desak karena program tersebut menunjukkan ketidakdisiplinan Korea Utara terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang telah ditandatangani.<sup>17</sup>

Metode penelitian ini menggunakan metode normatif dengan perspektif hukum internasional. Berkaitan dengan penelitian hukum normatif, peneliti menggunakan pendekatan kasus dengan cara meninjau kasus yang berkaitan

---

<sup>16</sup> Yordan Gunawan dan Rima Ayu Andriana, *The Proliferation of Nuclear Weapons in North Korea: International Law Perspective*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol, 5, No, 1 (2019), Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 33.

<sup>17</sup> Edith M. Lederer, *US says China and Russia blocking UN action on North Korea*. Diakses dalam <https://apnews.com/article/north-korea-missiles-us-china-6ce477f7e6267aba412cd4020f0bd263> (27/3/2023.15.00 WIB)

dengan isu tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang penulis lakukan ialah penelitian ini mengangkat isu proliferasi senjata nuklir Korea Utara dengan perspektif hukum internasional. Sedangkan penulis tidak berfokus pada senjata nuklirnya saja melainkan mengarah ke sanksi-sanksi.

Penelitian kelima yaitu skripsi yang disusun oleh **Isni Safirah Iraeni** dengan judul *“Pengaruh Uji Coba Nuklir Korea Utara terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Timur”*.<sup>18</sup> Hasil penelitian yang dilakukan Isni ialah mengenai apa saja pengaruh dari program nuklir Korea Utara terhadap negara-negara kawasan Asia Timur. China yang memiliki hubungan aliansi paling baik dengan Korea Utara, merespon uji coba nuklir ini dengan sikap tenang. Akibat dari uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap negara-negara tetangga dengan adanya perlombaan senjata antar satu sama lain.

Pada penelitian yang dilakukan Isni juga memaparkan awal mula terjadinya perkembangan senjata nuklir oleh Korea Utara kisaran tahun 1950. Pengembangan ini terjadi karena adanya ancaman dari Amerika Serikat atas penempatan tentara Amerika Serikat di kawasan Korea Selatan sebanyak 27 ribu dan 47 ribu tentara di kawasan Jepang. Selain itu, Korea Utara juga merasa bahwa akan lebih kuat dari Korea Selatan jika memiliki senjata nuklir. Korea Utara juga mempunyai beberapa alasan keamanan yang mendorong Korea Utara melakukan program senjata nuklir.

---

<sup>18</sup> Isni Safirah Iraeni, 2018, *Pengaruh Uji Coba Nuklir Korea Utara terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Timu*, Skripsi, Makassar: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Hasanudin, hal. 81.

Salah satunya karena Korea Utara memiliki ideologi tersendiri demi mencapai kepentingan nasionalnya.<sup>19</sup>

Metode penelitian ini ialah deskriptif dengan konsep kepentingan nasional dan security dilemma. Adapun manfaat dari penelitian ini agar memahami bagaimana pengaruh senjata nuklir Korea Utara terhadap keamanan di kawasan Asia Timur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis terletak pada konsep dan juga fokus pembahasan. Fokus pembahasan penelitian ini adalah memaparkan respon seluruh negara-negara kawasan Asia Tenggara, sedangkan penulisan fokus pada respon negara China.

**Tabel 1. 1 Posisi Penelitian**

| No | Nama dan Judul Penelitian   | Metode/Konsep  | Hasil Penelitian   |
|----|---|--|--|
| 1  | Analisa Dukungan Tiongkok Dalam Kebijakan Sanksi Ekonomi DK PBB Terhadap Korea Utara Tahun 2017<br><br>Oleh: Mariza Cesa Ulfa | Metode Penelitian:<br>Eksplanatif<br><br>Konsep/Teori:<br>Kebijakan luar negeri dan Kepentingan nasional | Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat sanksi ekonomi yang diberikan DK PBB terhadap Korea Utara yang tertera pada Resolusi No. 2356, 2371, 2375, dan 2379 Tahun 2017. Pada penelitian ini juga tertulis perubahan sikap Tiongkok dalam proses penyusunan resolusi. |
| 2  | China's Policy in Refusing North Korea Nuclear Proliferation<br><br>Oleh: Vera Zerlinda Alamsyah Sulaiman                     | Metode Penelitian:<br>Deskriptif kualitatif<br><br>Konsep/Teori:<br>Extended deterrence theory           | China tidak setuju dengan kebijakan proliferasi nuklir Korea Utara karena ada dampak besar bagi kepentingan nasional China sendiri.  |

<sup>19</sup> Dong Xiangrong, *China's Dilemma on the Korean Peninsula*, The Korean Journal of Defense Analysis, Vol, 25, No, 2 (2013), Beijing: Institute of International Strategy Studies, hal. 252.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | Karena hal itu, China juga memberikan sanksi ekonomi kepada Korea Utara.  |
| 3 | <p>Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri: Kebijakan China terhadap Korea Utara pada Isu Krisis Misil di Semenanjung Korea</p> <p>Oleh: Dwita Artsy Fitria dan Mohamad Rosyidin</p> | <p>Metode Penelitian: Deskriptif kualitatif</p> <p>Konsep/Teori: Konsep pemikiran Hermann</p>       | Melalui Menteri Luar Negerinya yaitu Wang Yi, tahun 2017 China menerima konsekuensi atas sanksi yang diberikan terhadap Korea Utara karena China sebagai negara yang terdampak atas sanksi tersebut sebab aliansi China dan Korea Utara di bidang ekonomi sangat erat.  |
| 4 | <p>The Proliferation of Nuclear Weapons in North Korea: International Law Perspective</p> <p>Oleh: Yordan Gunawan dan Rima Ayu Andriana</p>   | <p>Metode Penelitian: Normatif</p> <p>Konsep/Teori: Perspektif hukum internasional</p>              | Penelitian ini memaparkan awal pertemuan <i>six party talks</i> dalam menyelesaikan denuklirisasi Korea Utara dengan cara damai. Dengan adanya <i>six party talks</i> ini, Korea Utara sempat menanggapi dengan hal positif namun tidak bertahan lama. Korea Utara tetap mengembangkan teknologi senjata nuklirnya. |
| 5 | <p>Pengaruh Uji Coba Nuklir Korea Utara terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Timur</p> <p>Oleh: Isnı Safirah Iraeni</p>   | <p>Metode Penelitian: Deskriptif</p> <p>Konsep/Teori: Kepentingan nasional dan Security Dilemma</p> | Akibat dari uji coba nuklir Korea Utara ini berdampak tidak baik terhadap negara-negara tetangga. Pada penelitian ini dipaparkan alasan Korea Utara melakukan hal tersebut, salah satunya karena Korea Utara memiliki ideologi tersendiri demi mencapai kepentingan nasionalnya.                                    |

## 1.5 Teori/ Konsep

### Diplomasi Nuklir

Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep diplomasi nuklir. Abraham Bargman berpendapat bahwa diplomasi nuklir menggambarkan sebuah gagasan yang meliputi banyak hal seperti isu-isu strategis yang mencakup energi, kemanusiaan, ekonomi, hingga didefinisikan sebagai interaksi antar aktor internasional baik negara, individu, dan organisasi internasional.<sup>20</sup> Diplomasi menurut Hedley Bull merupakan hubungan antar negara yang dilakukan oleh wakil-wakil negara dengan tujuan untuk mencapai perdamaian. Dari diplomasi ini, suatu negara akan membuat keputusan untuk bekerja sama antar negara lain untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.<sup>21</sup> Diplomasi sendiri memiliki peran penting dalam menghindari konflik militer yang dapat terjadi akibat ketegangan terkait program nuklir.

Menurut Abraham Bargman ada beberapa hal yang penting dalam diplomasi nuklir. Salah satu pilar utamanya adalah pencegahan. Di mana negara-negara menggunakan ancaman penggunaan senjata nuklir untuk mencegah adanya tindakan agresi dari pihak luar. Selain itu, manajemen krisis juga sangat penting karena negara-negara yang terlibat harus memiliki kemampuan untuk mengelola situasi yang sangat tegang disebabkan oleh ancaman penggunaan senjata nuklir yang dapat memicu konflik besar. Hal ini melibatkan komunikasi yang baik antar negara-negara dan strategi untuk menurunkan ketegangan tersebut. Abraham

---

<sup>20</sup> Abraham Bargman, *Nuclear Diplomacy*, The Academy of Political Science, Vol, 32, No, 4, United States, hal. 159-169.

<sup>21</sup> Hedley Bull, 2002, *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*. London: Red Globe Press, hal. 156.

Bargman juga menekankan pentingnya pengendalian senjata sebagai bagian dari diplomasi nuklir. Dengan adanya perjanjian internasional, negara-negara berupaya untuk mengatur jumlah senjata nuklir yang dimiliki untuk mencegah adanya perlombaan senjata nuklir yang tidak terkendali.

Aspek utama diplomasi nuklir menurut Abraham Bargman ialah upaya untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan keamanan melalui dialog dan negosiasi antar negara-negara yang terlibat konflik.<sup>22</sup> Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan diplomatik, diskusi bilateral maupun multilateral melalui forum dan perjanjian internasional contohnya dengan diadakannya *six party talks* yang dibentuk oleh China untuk membujuk Korea Utara agar memberhentikan program nuklir tersebut, dan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir, serta mengurangi potensi konflik nuklir antar negara. Diplomasi nuklir bertujuan untuk menghindari konflik dan penggunaan senjata nuklir, serta memperkuat kesepakatan internasional untuk non-proliferasi nuklir.

Diplomasi nuklir juga melibatkan perjanjian kesepakatan mengenai pembatasan atau pengurangan senjata nuklir dan memberikan pengawasan atas program nuklir suatu negara. Namun, upaya diplomasi nuklir ini tidak selalu berhasil dan terkadang dihambat dengan adanya perbedaan pandangan antara negara-negara yang terlibat. Selain itu, sanksi-sanksi yang diberikan oleh negara-negara barat dan DK PBB terhadap Korea Utara atas program nuklirnya juga dapat mempengaruhi diplomasi nuklir yang dilakukan. Oleh karena itu, diplomasi nuklir

---

<sup>22</sup> Abraham Bargman, *Op. Cit.*



terhadap program nuklir Korea Utara memerlukan kerja sama internasional yang kuat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Praktik diplomasi nuklir berdasarkan teori/konsep Abraham Bargman yang dapat dilihat pada respon China dalam menghadapi kasus ini salah satunya adalah upaya China untuk membantu Korea Utara melalui bantuan luar politik hingga ekonomi dalam menghadapi sanksi DK PBB. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab, melainkan China dan Korea Utara telah memiliki Traktat Persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Timbal Balik (*Treaty of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance*) yang di dalamnya memuat poin bahwa kedua negara harus saling membantu ketika terjadi konflik. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai praktik diplomasi nuklir karena tindakan China berkaitan dengan konsep dasar diplomasi nuklir yang menyatakan bahwa usaha-usaha diplomasi yang berkaitan dengan senjata dan program nuklir suatu negara.

Pada 1 Juli 1968, ada Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir yang dibentuk dan ditandatangani oleh beberapa negara berdaulat termasuk Korea Utara untuk membatasi kepemilikan senjata nuklir. Perjanjian ini menyebutkan negara-negara mana saja yang diizinkan untuk memiliki senjata nuklir atau biasa disebut Nuclear Weapon States (NWS's) seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Uni Soviet, Prancis, dan China. Serta negara-negara yang tidak memiliki atau mengembangkan nuklir disebut Non Nuclear Weapon States (NNWS's) seperti Korea Utara, Iran, dan India. Negara-negara NNWS's setuju untuk tidak meneliti dan mengembangkan senjata nuklir.

Pada perjanjian tersebut disebutkan bahwa boleh menggunakan teknologi nuklir demi keamanan dengan cara damai. Namun Korea Utara tidak menepati perjanjian tersebut karena Korea Utara membentuk program nuklir demi mencapai kepentingan nasional negaranya sendiri. Sehingga konsep diplomasi nuklir ini dapat digunakan sebagai upaya dalam menangani permasalahan Korea Utara. Karena salah satu tujuan dari diplomasi nuklir ialah mencegah penyebaran senjata nuklir pada negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Konsep diplomasi nuklir melibatkan upaya untuk mengelola situasi yang berpotensi menimbulkan konflik terkait dengan program nuklir suatu negara melalui negosiasi, dialog, kerja sama internasional, dan kesepakatan antara negara-negara yang memiliki kemampuan nuklir atau terlibat dalam masalah nuklir, serta upaya untuk mengurangi ancaman nuklir dan meningkatkan keamanan nuklir global.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah jenis penelitian yang mengamati suatu peristiwa atau fenomena yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk menggambarkan apa yang terjadi. Fokus utama dari penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan objek penelitiannya. Dalam konteks ini, objek penelitian adalah tanggapan China terhadap sanksi yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara.

## **1.6.2 Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ialah pendekatan yang berfokus pada metodologi untuk menggali dan memahami fenomena sosial masalah manusia. Sehingga penelitian ini dimulai dengan pernyataan penelitian, pengumpulan data yang relevan, interpretasi terhadap data, serta penerapan konsep dan teori.<sup>23</sup>

## **1.6.3 Teknik Analisa Data**

Data yang penulis dapatkan ialah dengan menggunakan teknik induksi, yang kemudian diatur dan dianalisis secara deksriptif untuk mendukung jawaban dari pertanyaan penelitian ini.

## **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*) dengan berupa jurnal dan media internet untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan relevan.

## **1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian**

### **a. Batasan Waktu**

Batasan waktu penelitian ini tahun 2003-2023. Batasan awalnya ditentukan pada tahun 2003 karena pada tahun ini Korea Utara terus melakukan berbagai tindakan kontroversial yang memicu krisis di Semenanjung Korea dan pada tahun yang sama Korea Utara menembakkan rudal ke Laut Jepang. Sehingga membuat China pada Februari 2003 membentuk pembicaraan enam pihak

---

<sup>23</sup> Abdul Fattah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Harfa Creative, hal. 1.

multilateral atau *six party talks* yang diadakan di Beijing guna mencegah Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklirnya. Sampai tahun 2023, di mana pada tahun ini Korea Utara masih terus melakukan uji coba nuklir dan melakukan uji coba nuklir terbarunya yaitu uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM).

#### **b. Batasan Materi**

Batasan materi pada penelitian ini ialah menjelaskan respon China terhadap sanksi yang diberikan DK PBB kepada Korea Utara terkait senjata nuklirnya, secara singkat menjelaskan hubungan bilateral antara China dan Korea Utara, dan memberikan batasan materi pada konsep diplomasi nuklir.

### **1.7 Argumen Pokok**

Ada beberapa argumen pokok pada penelitian ini yaitu, China memiliki kepentingan dalam menjaga keamanan regional di sekitar Semenanjung Korea. China berusaha untuk mencegah adanya konflik atau perang dekat perbatasannya yang dapat mengancam keamanan nasional. Maka dari itu, China berupaya menghindari tindakan yang dapat memperburuk ketegangan dengan Korea Utara. Adanya sanksi yang terlalu ketat dapat merusak hubungan ekonomi yang terjalin antara kedua negara ini dan berdampak negatif bagi ekonomi China sendiri. Menurut China, sanksi yang terlalu ketat justru dapat memperburuk situasi dan memicu reaksi yang lebih keras dari Korea Utara.

Dalam konteks ini, China menggunakan peran diplomatiknya untuk menjadi mediator antara Korea Utara dengan negara-negara Barat yang

menghendaki denuklirisasi. Bagi China, melalui diplomasi nuklir mereka dapat mempertahankan peran penting mereka di wilayah tersebut. China melakukan strategi diplomasi koersif yang berujung pada upaya diplomasi yang agresif dan berkelanjutan untuk mengamankan denuklirisasi Semenanjung Korea. Strategi diplomasi yang dilakukan China telah dijabarkan dalam penulisan ini seperti diadakannya *six party talks* guna memfasilitasi dialog dan negosiasi antar semua pihak untuk mencapai penyelesaian damai atas permasalahan nuklir. Selain melalui dialog dan negosiasi, China juga mengupayakan diplomasi bilateral dengan Korea Utara dan Amerika Serikat.



## 1.8 Sistematika Penulisan

**Tabel 1. 2 Sistematika Penulisan**

|   |   |
|---|---|
| <b>BAB I<br/>PENDAHULUAN</b>  | <b>1.1</b> Latar Belakang<br><b>1.2</b> Rumusan Masalah<br><b>1.3</b> Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian<br>1.3.1 Tujuan Penelitian<br>1.3.2 Manfaat Penelitian<br>a. Manfaat Praktis<br>b. Manfaat Akademis<br><b>1.4</b> Penelitian Terdahulu<br><b>1.5</b> Teori/Konsep<br><b>1.6</b> Metode Penelitian<br>1.6.1 Jenis Penelitian<br>1.6.2 Metode/ Penelitian<br>1.6.3 Teknik Analisa Data<br>1.6.4 Teknik Pengumpulan Data<br>1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian<br>a. Batasan Waktu<br>b. Batasan Materi<br><b>1.7</b> Argumen Pokok<br><b>1.8</b> Sistematika Penulisan |
| <b>BAB II<br/>DAMPAK UJI<br/>COBA NUKLIR<br/>KOREA UTARA<br/>TERHADAP<br/>CHINA</b>   | <b>2.1</b> Pentingnya Korea Utara untuk China<br><b>2.2</b> Pengaruh Uji Coba Nuklir Korea Utara terhadap Hubungan Diplomatik China dan Korea Utara<br><b>2.3</b> Dampak Uji Coba Nuklir Korea Utara terhadap China   |
| <b>BAB III<br/>DIPLOMASI<br/>NUKLIR CHINA<br/>TERHADAP<br/>SANKSI-SANKSI<br/>KOREA UTARA<br/>TERKAIT<br/>SENJATA NUKLIR</b> | <b>3.1</b> Sanki-sanksi DK PBB terhadap Korea Utara<br><b>3.2</b> Respon China terhadap Program Nuklir Korea Utara  |
| <b>BAB IV<br/>PENUTUP</b>   | <b>4.1</b> Kesimpulan<br><b>4.2</b> Saran   |